

Kabinet Indonesia Maju

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Kendatipun tidak seheboh pembentukan Kabinet Kerja pada periode pertama masa kepresidenan Jokowi, hasil pengumuman dan pelantikan Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2024 pagi hari Rabu kemarin memunculkan beberapa sosok baru yang cukup mengejutkan. Hampir separuh dari pejabat menteri atau setingkat menteri adalah wajah-wajah lama yang sudah bersama presiden Jokowi pada masa jabatan pertama. Namun setidaknya Jokowi memenuhi janjinya untuk membuat komposisi kabinet yang 55% diisi oleh tenaga profesional dan bukan sekadar mengakomodasi tokoh-tokoh Parpol.

Tidak dapat dimungkiri bahwa postur kabinet dengan 38 kementerian ini termasuk tambun dan memunculkan keprihatinan tentang kesulitan koordinasi, suatu kecenderungan yang selalu terjadi dalam kabinet sejak penyelenggaraan Pilpres secara langsung tahun 2004. Pemurnian sistem presidensial sesuai amanah konstitusi masih sulit terjadi karena dalam kenyataannya sistem yang berlaku adalah sistem "semi-parlementer" di mana konfigurasi politik di parlemen tetap menentukan penunjukan para menteri di kabinet. Yang membedakan sekarang ini dari periode kepresiden sebelumnya pasca-reformasi hanyalah bahwa hak prerogatif Presiden lebih kentara karena Wakil Presiden tidak terlalu dilibatkan dalam pembentukan kabinet.

Dengan berbagai macam tantangan ekonomi global akibat perang dagang antara AS dan China, presiden tampaknya tidak mau mengambil risiko sehingga tetap mempercayakan tim ekonomi pada komposisi lama yang sudah akrab dengan pasar dan pelaku usaha. Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan, Basuki Hadimulyono di posisi Menteri PUPR, dan Budi Karya Sumadi di posisi Menteri Perhubungan merupakan komposisi yang tetap dipertahankan, kiranya dengan pertimbangan bahwa tim ini sudah relatif berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur. Teten Masduki juga termasuk tokoh lama pembantu dekat presiden yang kini ditugasi sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Sosok baru di tim ekonomi adalah Bahlil Lahadalia, mantan ketua Hipmi yang ditugasi sebagai Menteri Investasi / Kepala BKPM dan Agus Suparmanto (PKB) sebagai Menteri Perdagangan. Penunjukan Airlangga Hartarto (Golkar) di posisi Menko Perekonomian kiranya lebih berfungsi sebagai penambah jatah Parpol ketimbang keinginan untuk mengkoordinasi tim ekonomi yang sudah solid. Demikian juga penunjukan Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar) di posisi Menteri Perindustrian. Yang jelas, tantangan global yang dihadapi tim ekonomi akan lebih sulit jika dibandingkan periode rejim yang pertama, yaitu defisit transaksi berjalan, penggunaan anggaran publik yang efektif dan efisien, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan UMKM.

Perombakan cukup radikal terjadi di dalam komposisi tim pengembangan SDM. Muhadjir Effendy yang relatif berhasil menjalankan tugasnya pada periode sebelumnya kini menjabat sebagai Menko PMK (Pengembangan Manusia dan Kebudayaan), posisi yang sebelumnya ditempati oleh Puan Maharani. Bambang Brodjonegoro digeser posisinya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas menjadi Menristek yang sekaligus Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Kelemahan dalam penggunaan dana riset yang ditangani Kemenristekdikti akan diatasi dengan terbentuknya BRIN. Sementara itu kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang selama ini terpisah berdasarkan jenjang pendidikan selanjutnya akan diurus oleh Kemendikbud, yang kini

dipercayakan kepada Nadiem Makarim, sosok menteri berusia 35 tahun yang selama ini identik dengan keberhasilan Go-Jek, perusahaan *unicorn* yang valuasinya melejit dalam waktu beberapa tahun berkat aplikasi transportasi daring.

Masuknya Terawan Agus Putranto, dokter militer yang diantara para pakar medis termasuk kontroversial karena keberaniannya menggunakan prosedur invasif cuci-otak untuk mengatasi penderita stroke, juga merupakan kejutan. Keberaniannya di bidang klinis diharapkan menghasilkan terobosan kebijakan kesehatan di Indonesia yang sangat kronis, antara lain defisit BPJS yang kian menumpuk, pengurangan jumlah anak *stunting*, serta penanganan penyakit menular seperti TBC yang masih belum tuntas di Indonesia. Namun di luar itu, masalah-masalah sosial tampaknya masih dipercayakan kepada tokoh-tokoh dari Parpol, yaitu Juliari Peter Batubara (PDIP) sebagai Menteri Sosial, Ida Fauziyah (PKB) sebagai Menaker, Zainudin Amali (Golkar) sebagai Menpora, dan Abdul Halim Iskandar (PKB) sebagai Menteri Desa dan PDTT.

Sebagian dari pendukung setia PKS dan partai Gerindra yang militan pasti kecewa dengan keputusan Pimpinan Gerindra yang akhirnya masuk jajaran kabinet. Tidak tanggung-tanggung, dua tokoh Gerindra kini ada di pemerintahan, yaitu Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Proporsi ini bahkan lebih besar daripada jatah untuk PPP yang saat ini ditempati oleh Suharso Monoarfa, tokoh lama yang kini menduduki jabatan sebagai Menteri PPN / Kepala Bappenas. Kinerja Susi Pujiastuti di KKP yang cemerlang dan menempati peringkat tertinggi dalam persepsi publik ternyata sekarang digantikan oleh tokoh dari Parpol.

Masuknya beberapa tokoh militer dan jajaran keamanan menjadi isyarat bahwa pemerintahan di bawah Jokowi cukup serius untuk menjalankan program deradikalisasi, sebuah isu yang membayangi bangsa Indonesia dengan kekuatan-kekuatan ekstrem dan membelah ideologi secara diametral. Kementerian Agama kini dipercayakan kepada Fachrul Razi, tokoh militer yang bagi sebagian pengemuka agama masih belum kuat dalam hal spiritualitas keagamaan tetapi bagi pemerintah sangat diperlukan untuk menangkal deradikalisasi. Demikian pula ditunjuknya Tito Karnavian sebagai Mendagri akan memperkuat pendekatan disiplin dan sistem komando dalam pemerintahan dalam negeri, sesuatu yang bagi sebagian dipersepsikan sebagai kemunduran karena sejak reformasi posisi Mendagri sudah diserahkan kepada para tokoh sipil.

Meskipun Jokowi menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas dalam masa pemerintahan kedua, penunjukan Tjahjo Kumolo (PDIP) sebagai Menteri PAN dan RB sebenarnya kurang begitu menjanjikan. Barangkali pertimbangannya adalah pendekatan disiplin untuk memotong ribuan jabatan Eselon-3 dan Eselon-4 yang konon akan dihapus sehingga jajaran ASN hanya mengenal dua jenjang jabatan struktural, yaitu Eselon-1 dan Eselon-2. Untuk kalangan internal kabinet, presiden Jokowi tetap mempertahankan orang yang sama untuk jabatan Mensesneg, Kepala KSP, dan Menteri Sekretariat Kabinet.

Harapan publik untuk kinerja kabinet yang lebih baik tentu bertumpu pada sosok-sosok lain yang profesional seperti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Erick Thohir sebagai Meneg BUMN, Arifin Tasrif sebagai Meneg BUMN, dan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Kita benar-benar berharap bahwa kaum profesional ini tidak mudah terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan politik di dalam kabinet, meskipun harapan yang sama juga berlaku untuk para tokoh Parpol. Selamat bekerja kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju!

Penulis adalah gurubesar pada Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM